

## **KINERJA KEUANGAN MEMEDIASI DANA PERIMBANGAN, ALOKASI BELANJA DAERAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUASIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

**Ni Putu Ari Aryawati<sup>1</sup>**

**I Putu Sudana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

email: niputuarua@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung dari dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat serta kemampuan kinerja keuangan daerah dalam memediasi pengaruh tersebut. Penelitian menggunakan metode sampel jenuh. Alat analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh positif dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada pertumbuhan ekonomi. Variabel alokasi belanja daerah memiliki pengaruh negatif pada IPM. Kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh alokasi belanja daerah pada IPM dan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil penelitian ini, untuk meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi NTB harus memperhatikan jumlah dana perimbangan, alokasi belanja daerah dan pencapaian kinerja keuangan daerah karena ketiga variabel tersebut terbukti mempengaruhi IPM dan pertumbuhan ekonomi NTB baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Kata kunci:** IPM, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah

## ***FINANCIAL PERFORMANCE MEDIATES EQUITY FUND, REGIONAL ALLOCATION ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND ECONOMIC GROWTH***

### ***ABSTRACT***

*The aim of this study was to analyzes whether the fiscal balance transfer, regional allocation budget and regional financial performance directly affects the human development index and economic growth in the Regency / City throughout West Nusa Tenggara Province and indirect effect of fiscal balance transfer and regional allocation budget on human development index and economic growth with the financial performance as a mediating variable. Analysis of the data in this research used Partial Least Square (PLS) analysis. The results of the analysis show that there are positive affect between fiscal balance transfer and regional allocation budget on economic growth. Regional allocation budget has negative affect to HDI. Regional allocation budget influence partial mediation on human development index and economic growth with regional financial performance as a mediating variable. The result of this study, to maximize the HDI and economic growth of West Nusa Tenggara Province should consider the amount of fiscal balance transfer, regional allocation budget and regional financial performance because the variables are proven to affect HDI and economic growth of West Nusa Tenggara Province either directly or indirectly.*

**Keywords:** HDI, economic growth, regional financial performance

**DOI:** <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i01.p04>

### **PENDAHULUAN**

Upaya dalam meningkatkan daya saing daerah melalui otonomi daerah harus memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

daerah. Otonomi daerah diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranan masyarakat. Reformasi dan demokratisasi otonomi daerah sering mengalami perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik, hal ini akan berpengaruh pada percepatan perubahan tingkah laku masyarakat terutama pada desakan untuk menerapkan transparansi pelaksanaan kebijakan, demokratisasi pengambilan keputusan, pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Pemberian pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia juga diharapkan dapat bergerak sinergis dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas delapan kabupaten serta dua kota yang sedang mengalami perkembangan cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi terjadi sebesar -3,91 persen pada tahun 2011 yang meningkat menjadi sebesar 21,24 pada tahun 2015 (BPS, 2016). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana yang mampu mendukung percepatan pembangunan. Peningkatan infrastruktur ini juga berdampak pada peningkatan kualitas manusia yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat IPM NTB pada tahun 2009-2012 berada pada posisi 32 dari 33 Provinsi di Indonesia, sedangkan pada tahun 2013 berada pada posisi 33 dari 34 Provinsi di Indonesia. Namun pada tahun 2015 NTB berada pada posisi 30 dari 34 Provinsi di Indonesia. IPM Provinsi NTB selama kurun waktu 2010 sampai 2014 terus menunjukkan tren positif dan menempati peringkat ke-2 untuk percepatan peningkatan IPM ([www.radarlombok.co.id](http://www.radarlombok.co.id)). Kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lainnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami fluktuasi kecuali Kabupaten Lombok Barat yang semakin meningkat dari tahun 2011-2015. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota di NTB belum mengoptimalkan pendapatan daerah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin meningkat dan alokasi belanja daerah pun mengalami peningkatan. Transfer dari pemerintah pusat berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Transfer yang diterima oleh daerah memiliki kecenderungan meningkatkan perilaku konsumen dalam hal ini pemerintah daerah

sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dalam bentuk konsumsi di bidang kesehatan, pendidikan, standar hidup layak masyarakat serta peningkatan pendapatan domestik regional bruto.

Alokasi belanja daerah disusun oleh pemerintah daerah (*steward*) kemudian disetujui oleh DPRD (*principal*) harus diprioritaskan guna pembangunan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Permendagri No. 52/2015). Teori *stewardship* menggambarkan tentang hubungan alokasi belanja daerah pada kinerja keuangan daerah yang berimplikasi pada tujuan dari alokasi belanja daerah itu sendiri. Pemerintah daerah (*steward*) akan cenderung untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat (*principal*) untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini peningkatan kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Provinsi NTB terkategori sebagai propinsi yang masih memiliki IPM rendah. Peningkatan harapan hidup, pendidikan, dan kemampuan ekonomi rumah tangga akan meningkatkan pendapatan kotor daerah. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kinerja keuangan yang dicapai oleh daerah dan alokasi belanja yang ditetapkan dalam upaya membangun kemampuan sumber daya manusia yang ada serta jumlah dana perimbangan yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat. Terdapat dugaan bahwa alokasi belanja daerah yang ditetapkan dan dana perimbangan pada tahun anggaran yang sama tidak serta merta meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi, namun memungkinkan adanya pengaruh variabel *intervening* dalam hal ini kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini menganalisis hubungan masing-masing antara dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, hubungan antara dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan daerah sebagai variabel mediasi. Penelitian yang menggabungkan pengaruh alokasi belanja daerah dan dana perimbangan terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan belum pernah dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya agar tingkat alokasi dan komposisi belanja daerah diatribusikan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun pokok permasalahan yang diteliti yaitu: Apakah dana perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah di Provinsi NTB? Apakah dana perimbangan berpengaruh pada IPM di Provinsi NTB? Apakah dana perimbangan berpengaruh pada pertumbuhan

ekonomi di Provinsi NTB? Apakah alokasi belanja daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah di Provinsi NTB? Apakah alokasi belanja daerah berpengaruh pada indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB? Apakah alokasi belanja daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di NTB? 7) Apakah kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh pada indeks pembangunan manusia di Provinsi NTB? 8) Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB? Apakah kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh dana perimbangan pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi? Apakah kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi?

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap teori desentralisasi fiskal dengan didukung oleh teori *stewardship* dan teori perilaku konsumen. Kebijakan yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah daerah (*steward*) kemudian ditetapkan oleh DPRD (*principal*) sebagai upaya penyelenggaraan desentralisasi fiskal dengan memperhatikan perilaku masyarakat yang mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah serta berdampak pada peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kegunaan praktis penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan daerah agar alokasi belanja daerah dapat terpenuhi dalam upaya peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi.

*Local experiment* disebabkan oleh teori desentralisasi yang melihat dan mempelajari pengalaman daerah lain. Suatu daerah dapat meniru keberhasilan dan belajar dari pengalaman kegagalan daerah lain. Federalisme fiskal memiliki dua perspektif teori yaitu *traditional theories (first generation theories)* dan *new perspective theories (second generation theories)*. Teori ini menyatakan bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, di mana hal tersebut bergantung kepada insentif fiskal yang diberikan kepada masyarakat. Desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan tercipta efisiensi dalam perekonomian. Pada akhirnya akan tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk melakukan improvisasi untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh suatu

daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah tersebut. Beberapa penelitian memberikan bukti empiris bahwa dana perimbangan merupakan sarana pendidikan untuk pemerintah daerah sebagai upaya pengumpulan PAD (Sidik, 2002). Kenaikan dana perimbangan akan meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah riil per kapita (Naganathan dan Sivagnanam, 1999; Kuncoro, 2007). Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan yang berbeda dan prioritas pembangunan yang berbeda serta kinerja keuangan yang berbeda pula. Untuk mendukung program pembangunan serta meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka daerah dituntut untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Adapun hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Dana perimbangan berpengaruh positif pada kinerja keuangan daerah.

H<sub>2</sub> : Dana perimbangan berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia.

H<sub>3</sub> : Dana perimbangan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Teori *stewardship* merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis yang memiliki akar psikologi dan sosiologi. Teori ini didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Pemerintah daerah akan berperilaku untuk mencapai kepentingan bersama dan ketika kepentingan pemerintah daerah dan DPRD (selaku wakil rakyat) tidak sama, pemerintah daerah dalam hal ini *steward* berusaha untuk bekerja sama daripada menentang karena pemerintah daerah merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku DPRD selaku pemilik dengan pertimbangan yang rasional. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memperhatikan usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* meyakini bahwa pemerintah daerah dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik maupun *stakeholders*.

Teori perilaku konsumen merupakan penggambaran bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan di antara berbagai barang dan jasa yang tersedia untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka (Pindyck dan Rubinfeld, 2014). Pemerintah daerah sebagai konsumen akan mengalokasikan dana perimbangan yang diperoleh dari pusat ke dalam alokasi belanja daerah untuk membiayai kegiatan rutin, pembangunan, dan peningkatan kualitas manusia serta secara tidak langsung bertujuan

untuk meningkatkan kinerja keuangan pada suatu daerah tertentu. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran sektor publik adalah dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas pemerintah (Mardiasmo, 2009). Anggaran sektor publik terdiri atas rencana kegiatan yang direpresentasikan sebagai rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

*Steward* menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pendekatan kinerja senantiasa mengutamakan upaya pencapaian *output* dari perencanaan *input* yang ditetapkan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar kewenangan pusat serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menetapkan kebijakan daerah dalam rangka melayani, meningkatkan peran, serta prakarsa dan memberdayakan masyarakat. Suryati (2015) yang menemukan bahwa belanja daerah klasifikasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap IPM berdasarkan parameter hasil estimasi. Ekaristi (2007) maupun Dollery dan Worthington (1995) menyatakan bahwa variabel transfer dapat mempengaruhi PAD. Mirza (2012) juga menyatakan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan IPM. Lin dan Liu (2000) menemukan bahwa pemerintah harus meningkatkan investasi modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adi (2006) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang diajukan:

H<sub>4</sub> : Alokasi belanja daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan daerah.

H<sub>5</sub> : Alokasi belanja daerah berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia.

H<sub>6</sub> : Alokasi belanja daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk lebih mandiri. Kemandirian tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja keuangan daerah yang diharapkan juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dituntutnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, mendorong *steward* untuk menggunakan hasil pendapatan asli daerah secara terbuka dan bebas dari penyelewangan (korupsi). Amalia dan Purbadharmaja (2014)

menemukan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh pada IPM. Suryaningsih dkk., (2015) juga menemukan bahwa kinerja keuangan daerah mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2011. Sehingga hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah:

H<sub>7</sub> : Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif pada indeks pembangunan manusia.

H<sub>8</sub> : Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

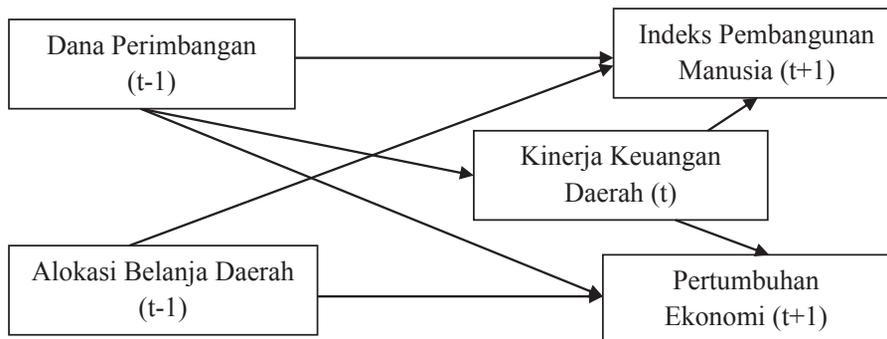
Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah adalah dengan memberikan transfer dana atau dana perimbangan kepada daerah. Pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk melakukan improvisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah. Hal ini dijelaskan oleh teori desentralisasi fiskal. Penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan antara dana perimbangan dengan kesejahteraan masyarakat. Pusporini (2006) juga menunjukkan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dana perimbangan merupakan sarana edukasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan PAD (Sidik, 2001). Kenaikan jumlah transfer (dana perimbangan) secara signifikan meningkatkan perolehan PAD riil per kapita Sivagnanam, 1999; Kuncoro, 2007). Ketika kinerja keuangan daerah semakin meningkat maka hal ini berimplikasi pada peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah

H<sub>9</sub> : Kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh dana perimbangan pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pendekatan kinerja senantiasa mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku *steward* melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja keuangan daerah. Lin dan Liu (2000) menemukan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal agar perekonomian daerah dapat meningkat dengan meningkatnya investasi modal

maka kinerja keuangan daerah akan meningkat pula. Hal ini mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah:

H<sub>10</sub> : Kinerja keuangan daerah memediasi pengaruh alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

Sumber: Data diolah, 2017

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kotase-Provinsi NTB. Sampel diambil dengan teknik *nonprobability sampling* dengan metode sampel jenuh. Objek dari penelitian ini adalah dana perimbangan dan alokasi belanja daerah tahun 2009-2013, kinerja keuangan daerah tahun 2010-2014, serta indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomin tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan IPM dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat dan kinerja keuangan daerah sebagai variabel mediasi sedangkan variabel bebas adalah dana perimbangan dan alokasi belanja daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi (UNDP, 2004). Indeks pembangunan manusia t+1 (tahun 2011-2015) yang bertujuan untuk melihat dampak yang dihasilkan oleh dana perimbangan pada t-1 (tahun 2009-2013), alokasi belanja daerah pada t-1 (tahun 2009-2013), dan kinerja keuangan daerah tahun ke-t (2010-2014). Pendekatan yang digunakan untuk mengukur IPM terdiri dari (BPS, 2016):

Dimensi umur panjang dan sehat

Indeks Harapan Hidup =

$$\frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimensi pengetahuan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}; I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi kehidupan yang layak

Indeks Standar Hidup Layak =

$$\frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \dots(3)$$

Keterangan:

- AHH : Angka Harapan Hidup
- AHHmin : Angka Harapan Hidup Minimum
- AHHmaks : Angka Harapan Hidup Maksimum
- IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah

- HLS : Harapan Lama Sekolah
- HLSmin : Harapan Lama Sekolah Minimum
- HLSmaks : Harapan Lama Sekolah Maksimum
- RLS : Rata-Rata Lama Sekolah
- RLSmin : Rata-Rata Lama Sekolah Minimum
- RLSmaks : Rata-Rata Lama Sekolah Maksimum

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan PDRB t+1 (tahun 2011-2015). Indikator untuk mengukur dana perimbangan adalah jumlah dana berikut dengan periode t-1 (2009-2013), yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Alokasi belanja daerah dalam penelitian ini merupakan prediktor dari indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, alokasi belanja daerah yang digunakan adalah alokasi belanja daerah tahun t-1 dengan tujuan untuk melihat hasil yang terjadi pada t+1.

Kinerja keuangan daerah merupakan hasil yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun ke t yang akan berdampak bagi pembangunan daerah baik di bidang sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun t+1. Halim (2009: 119) mengatakan bahwa beberapa rasio yang dapat

dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antar lain rasio kemandirian rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Kemandirian daerah dihitung dengan persamaan (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \dots(4)$$

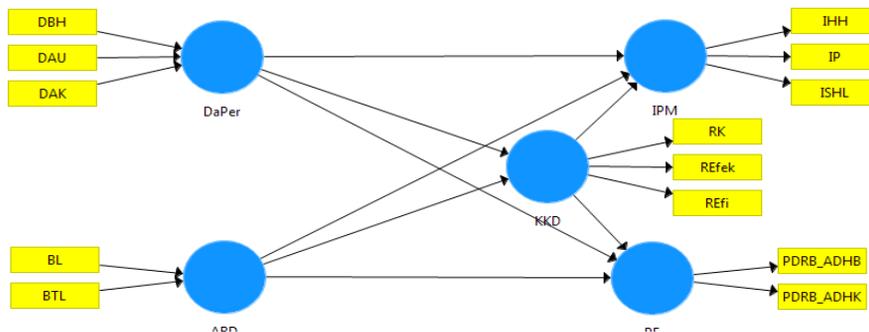
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007) :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \dots\dots(5)$$

Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi (Halim, 2007).

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \dots(6)$$

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). Tahap analisis yang dilakukan adalah merancang model struktural dan model pengukuran, konversi diagram jalur, estimasi koefisien jalur, evaluasi model, evaluasi *goodness of fit*, dan pengujian hipotesis.



**Gambar 2.**  
**Model Struktural dan Pengukuran**

Sumber: Data diolah, 2017

Bentuk persamaan *inner model* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM = \gamma_1 DP + \gamma_2 ABD + \gamma_3 KKD + \zeta_1$$

$$PE = \gamma_4 DP + \gamma_5 ABD + \gamma_6 KKD + \zeta_2$$

$$KKD = \gamma_7 DP + \gamma_8 ABD + \zeta_3$$

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

PE : Pertumbuhan Ekonomi

DP : Dana Perimbangan

ABD : Alokasi Belanja Daerah

KKD : Kinerja Keuangan Daerah

$\gamma_1 - \gamma_8$  : koefisien pengaruh variabel eksogen

$\zeta_1 - \zeta_3$  : Zeta, galat model

Bentuk *outer models* dalam penelitian ini :

Persamaan untuku *outer model* konstruk dana perimbangan dengan indikator formatif dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$DP = \lambda_{11}DBH + \lambda_{12}DAU + \lambda_{13}DAK + \varepsilon_1 \dots \dots (7)$$

Persamaan untuk *outer model* konstruk alokasi belanja daerah dengan indikator formatif dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$ABD = \lambda_{21}BL + \lambda_{22}BTL + \varepsilon_2 \dots \dots \dots (8)$$

Persamaan untuk *outer model* konstruk kinerja keuangan daerah dengan indikator reflektif dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$RK = \lambda_{31}KKD + \varepsilon_{31} \dots \dots \dots (9)$$

$$REfek = \lambda_{32}KKD + \varepsilon_{32} \dots \dots \dots (10)$$

$$REfi = \lambda_{33}KKD + \varepsilon_{33} \dots \dots \dots (11)$$

Persamaan untuk *outer model* konstruk indeks pembangunan manusia dengan indikator reflektif dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$IHK = \lambda_{41}IPM + \varepsilon_{41} \dots \dots \dots (12)$$

$$IP = \lambda_{42}IPM + \varepsilon_{42} \dots \dots \dots (13)$$

$$ISHL = \lambda_{43}IPM + \varepsilon_{43} \dots \dots \dots (14)$$

Persamaan untuk *outer model* konstruk pertumbuhan ekonomi dengan indikator reflektif dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$PDRB\_ADHB = \lambda_{51}PE + \varepsilon_{51} \dots \dots \dots (15)$$

$$PDRB\_ADHK = \lambda_{52}PE + \varepsilon_{52} \dots \dots \dots (16)$$

Keterangan:

- DP : Variabel *eksogen* (Dana Perimbangan)
- $\lambda_{11}DBH$  : *Component loading* indikator Dana Bagi Hasil
- $\lambda_{12}DAU$  : *Component loading* indikator Dana Alokasi Umum
- $\lambda_{13}DAK$  : *Component loading* indikator Dana Alokasi Khusus
- ABD : Variabel *eksogen* (Alokasi Belanja Daerah)

- $\lambda_{21}BL$  : *Component loading* indikator Belanja Langsung
- $\lambda_{22}BTL$  : *Component loading* indikator Belanja Tidak Langsung
- KKD : Variabel *eksogen* (Kinerja Keuangan Daerah)
- RK : *Component loading* indikator Rasio Kemandirian
- REfek : *Component loading* indikator Rasio Efektivitas
- REfi : *Component loading* indikator Rasio Efisiensi
- IPM : Variabel *eksogen* (Indeks Pembangunan Manusia)
- IHK : *Component loading* indikator Indeks Harapan Hidup
- IP : *Component loading* indikator Indeks Pendidikan
- ISHL : *Component loading* indikator Indeks Standar Hidup Layak
- PE : Variabel *endogen* (Pertumbuhan Ekonomi)
- $\varepsilon$  : Epsilon, galat pengukuran
- PDRB\_ADHB : *Component loading* indikator PDRB Atas Dasar Harga Konstan
- PDRB\_ADHK : *Component loading* indikator PDRBi Atas Dasar Harga Berlaku

Evaluasi *outer model* dilakukan dengan cara, yaitu: *Convergent Validity* (CV) digunakan untuk melihat korelasi atau *loading factor* antara variabel terukur dengan variabel latennya (Ghozali, 2015). Nilai signifikansi variabel terukur terhadap variabel latennya diharapkan kurang dari 0,05 atau *p value* harus lebih kecil dari 0,05 (Utama, 2014). *Composite reliability* untuk menyatakan suatu variabel reliabel. Variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai lebih dari 0,60 untuk *cronbach alpha*, lebih besar dari 0,70 untuk *composite reliability* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,50 (Ghozali, 2015).

*Inner model* dilakukan dengan melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya (Utama, 2014). Di samping itu juga harus diperhatikan  $R^2$  untuk variabel laten dependen. Nilai  $R^2$  lebih besar atau sama dengan 0,67 dikatakan baik, nilai  $R^2$  lebih besar atau sama dengan 0,33 dan tidak lebih dari 0,67 dikatakan moderat, sedangkan nilai  $R^2$  lebih kecil atau sama dengan 0,19 dikatakan lemah.

Kemampuan prediksi model PLS juga dapat dievaluasi dengan menggunakan *Stone-Geisser Q Square test*. *Q-Square test* dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2) \dots (1 - R_n^2) \dots (17)$$

Keterangan:

$Q^2$  : Q-Square

$R^2$  : R-square

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi model penelitian dilakukan dengan menggunakan *convergent validity* yang merupakan hasil keluaran dari program *SmartPLS 3.0*. *P value* di masing-masing dimensi konstruk lebih kecil dari 0,05 (*p value < 0,05*). Hal ini berarti bahwa konstruk yang dibuat telah memenuhi syarat *convergent validity*. Hasil output PLS mengenai *convergent validity* disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.**

**Outer Loading Indikator Terhadap Konstruk Dana perimbangan ( $X_1$ ), Alokasi belanja daerah ( $X_2$ ), Kinerja keuangan daerah ( $X_3$ ), Indeks pembangunan manusia ( $Y_1$ ) dan Pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ )**

Hubungan Antarvariabel		Loading	Sterr	t statistic	P value
X11	<-- Dana perimbangan	0,988	0,116	8,507	0,000
X12	<-- Dana perimbangan	0,487	0,165	2,958	0,003
X13	<-- Dana perimbangan	-0,039	0,185	0,211	0,033
X21	<-- Alokasi belanja daerah	0,925	0,050	18,640	0,000
X22	<-- Alokasi belanja daerah	0,952	0,055	17,386	0,000
X31	<-- Kinerja keuangan daerah	-0,620	0,678	0,916	0,036
X32	<-- Kinerja keuangan daerah	0,215	0,307	0,703	0,048
X33	<-- Kinerja keuangan daerah	0,844	0,750	1,124	0,026
Y11	<-- Indeks pembangunan manusia	0,973	0,226	4,295	0,000
Y12	<-- Indeks pembangunan manusia	0,925	0,214	4,319	0,000
Y13	<-- Indeks pembangunan manusia	0,772	0,248	3,115	0,002
Y21	<-- Pertumbuhan ekonomi	0,999	0,001	1.907,209	0,000
Y22	<-- Pertumbuhan ekonomi	0,999	0,001	1.633,938	0,000

Sumber: Data diolah, 2017

Kelayakan konstruk dapat diukur menggunakan nilai *Cronbach Alpha*, *Composite reliability* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Hasil pengujian

kelayakan konstruk dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.**

***Cronbach Alpha*, *Composite reliability* dan *Average Variance Extracted (AVE)* Dana Perimbangan ( $X_1$ ), Alokasi Belanja Daerah ( $X_2$ ), Kinerja Keuangan Daerah ( $X_3$ ), Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_1$ ) dan Pertumbuhan**

Variabel Konstruk	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Composite reliability</i>	<i>Average Variance</i>
Dana perimbangan	0,922	0,799	0,922
Alokasi belanja daerah	0,960	0,873	0,799
Kinerja keuangan daerah	0,799	0,960	0,873
Indeks pembangunan manusia	0,873	0,922	0,799
Pertumbuhan ekonomi	0,999	0,999	0,999

Sumber: Data diolah, 2017

Setiap konstruk dinyatakan layak jika konstruk tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,60 untuk *Cronbach Alpha*, di atas 0,70 untuk *Composite*

*Reliability* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang lebih besar dari 0,50. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa konstruk dana perimbangan

(X<sub>1</sub>), alokasi belanja daerah (X<sub>2</sub>), kinerja keuangan daerah (X<sub>3</sub>), indeks pembangunan manusia (Y<sub>1</sub>) dan pertumbuhan ekonomi (Y<sub>2</sub>) sangat bagus. Hal ini disebabkan karena memiliki *discriminant validity* yang jauh lebih besar dari 0,60 untuk *Cronbach Alpha*, lebih besar dari 0,70 untuk *Composite Reliability* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,50. Hal ini menunjukkan

bahwa konstruk dalam penelitian ini adalah reliabel sehingga konstruk yang dibangun dalam penelitian ini adalah layak.

Nilai R<sup>2</sup> dalam penelitian ini terdapat tiga konstruk dependen yaitu kinerja keuangan daerah (X<sub>3</sub>), indeks pembangunan manusia (Y<sub>1</sub>) dan pertumbuhan ekonomi (Y<sub>2</sub>). Nilai R<sup>2</sup> untuk konstruk dependen disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Nilai R<sup>2</sup> Konstruk Dependen**

Konstruk	Nilai R <sup>2</sup>
Kinerja keuangan daerah	0,180
Indeks pembangunan manusia	0,103
Pertumbuhan ekonomi	0,847

Sumber: Data diolah, 2017

Nilai R<sup>2</sup> dari konstruk kinerja keuangan daerah (X<sub>3</sub>)= 0,180. Oleh ukarena nilai tersebut lebih kecil dari 0,19 berarti model ipengaruh dana perimbangan (X<sub>1</sub>) dan alokasi belanja daerah (X<sub>2</sub>) pada kinerja keuangan daerah (X<sub>3</sub>) tergolong lemah. Di sisi lain, nilai R<sup>2</sup> dari indeks pembangunan manusia (Y<sub>1</sub>) sebesar 0,103 oleh karena nilai tersebut < 0,19 maka tergolong lemah, sedangkan pertumbuhan ekonomi

(Y<sub>2</sub>) sebesar 0,847 dan tergolong baik. Perhitungan *Stone-Geiser Q Square test* (Q<sup>2</sup>) adalah:

$$Q^{27} = 1 - \{(1-R1^2) (1-R2^2) (1-R3^2)\}$$

$$Q^{20} = 1 - \{(1-0,103) (1-0,180) (1-0,847)\}$$

$$Q^{29} = 0,8876$$

**Tabel 4.**  
**Pengaruh Langsung Antarvariabel Konstruk**

Hubungan Antarvariabel	Loading	Std Err	t statistic	p value	Keterangan
Dana perimbangan → Kinerja keuangan daerah	0,008	0,373	0,021	0,983	Tidak Signifikan
Dana perimbangan → Indeks pembangunan manusia	0,334	0,262	1,277	0,202	Tidak Signifikan
Dana perimbangan → Pertumbuhan ekonomi	0,369	0,161	2,300	0,022	Signifikan
Alokasi belanja daerah → Kinerja keuangan daerah	-0,430	0,501	0,858	0,391	Tidak Signifikan
Alokasi belanja daerah → Indeks pembangunan manusia	-0,487	0,242	2,015	0,044	Signifikan
Alokasi belanja daerah → Pertumbuhan ekonomi	0,444	0,129	3,436	0,001	Signifikan
Kinerja keuangan daerah → Indeks pembangunan manusia	-0041	0,220	0,189	0,850	Tidak Signifikan
Kinerja keuangan daerah → Pertumbuhan ekonomi	-0,302	0,304	0,993	0,321	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah, 2017

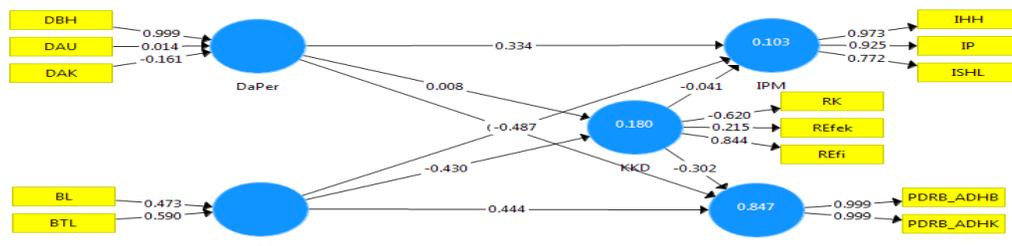
Nilai  $Q^2$  sebesar 0,8876 ini tergolong sangat besar, dan dapat dikatakan bahwa model penelitian ini memiliki nilai *predictive prevalence* yang tinggi, sehingga model yang dihasilkan layak digunakan untuk memprediksi. Angka  $Q^2$  sebesar 0,8876 memiliki arti bahwa 88,76 persen variasi dari indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dana perimbangan ( $X_1$ ), alokasi belanja daerah ( $X_2$ ) dan kinerja keuangan daerah ( $X_3$ ).

Pengujian *inner model* yang disebut juga pengujian antar konstruk pertama-tama dilakukan dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk

yang diuji. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil pengujian delapan hipotesis yang ada pada Tabel 4 menyatakan bahwa terdapat enam hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Namun, dua hasil pengujian lainnya menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan dengan nilai p kurang dari 5 persen. Variabel yang berpengaruh lebih besar pada pertumbuhan ekonomi adalah alokasi belanja daerah yaitu dengan koefisien sebesar 0,444 dibandingkan dengan variabel dana perimbangan yang pengaruhnya hanya 0,369.

Pengaruh antar variabel dalam penelitian disajikan pada Gambar 3.



**Gambar 3.**  
**Koefisien Hubungan Langsung Antar Variabel**

Sumber: Data diolah, 2017

Hubungan tidak langsung atau mediasi antar variabel dalam penelitian ini terdapat pada tabel 5. Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel kinerja keuangan daerah secara signifikan memperlemah pengaruh dana perimbangan ( $X_1$ ) pada indeks pembangunan manusia ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) yaitu dengan signifikansi sebesar 0,013 dan 0,002. Oleh karena secara langsung dana

perimbangan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia ( $Y_1$ ) maka peran variabel kinerja keuangan daerah ( $X_3$ ) disebut *full mediation* atau mediasi penuh, sedangkan secara langsung dana perimbangan ( $X_1$ ) berpengaruh langsung pada pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) sehingga peran variabel kinerja keuangan daerah ( $X_3$ ) disebut *partial mediation* atau mediasi sebagian.

**Tabel 5.**  
**Pengaruh Tidak Langsung Antarvariabel Konstruk**

Hubungan Antarvariabel	Variabel Mediasi	Loading	Std Err	t statistic	p value
Dana perimbangan → Indeks pembangunan manusia	Kinerja keuangan daerah	-0,000	0,116	0,003	0,013
Dana perimbangan → Pertumbuhan ekonomi	Kinerja keuangan daerah	-0,002	0,151	0,016	0,002
Alokasi belanja daerah → Indeks pembangunan manusia	Kinerja keuangan daerah	0,018	0,123	0,145	0,018
Alokasi belanja daerah → Pertumbuhan ekonomi	Kinerja keuangan daerah	0,130	0,107	1,216	0,027

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 5 juga menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah ( $X_3$ ) secara signifikan alokasi belanja daerah ( $X_2$ ) memberikan pengaruh yang

lebih kuat pada indeks pembangunan manusia ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) dengan signifikansi masing-masing sebesar 0,018 dan 0,027. Oleh

karena secara langsung pengaruh alokasi belanja daerah secara langsung pada indeks pembangunan manusia ( $Y_1$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) adalah signifikan, maka peran kinerja keuangan daerah ( $X_3$ ) disebut *partial mediation* atau mediasi sebagian.

Hasil analisis hipotesis satu ( $H_1$ ) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah sehingga hipotesis nol diterima dan hipotesis satu ditolak. Penelitian ini berkontribusi pada teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Tiebout (1956). Pemerintah daerah telah diberikan ruang gerak untuk melakukan improvisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, namun dana yang digunakan sebagai upaya dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah dirasa masih kurang dalam rangka mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naganathan dan Sivagnanam (1999), dan Kuncoro (2007) yang menyatakan bahwa kenaikan dana perimbangan secara signifikan meningkatkan perolehan PAD. Sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan tahun sebelumnya (2009-2013) tidak memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah tahun sekarang (2010-2014). Hal ini terjadi karena dana perimbangan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah tahun yang lalu tidak mampu menjadi prediktor dan mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah tahun berjalan.

Analisis hipotesis dua ( $H_2$ ) diperoleh hasil bahwa dana perimbangan tahun sebelumnya (2009-2013) tidak berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan manusia tahun mendatang (2011-2015). Sehingga penelitian ini tidak memberikan kontribusi pada teori perilaku konsumen. Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pendapatan dihabiskan untuk tahun anggaran berjalan sehingga jumlah konsumsi untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan layak hidup masyarakat pada tahun mendatang tidak menggunakan dana perimbangan yang diterima pada tahun sebelumnya. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Harahap (2011) yang menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif pada IPM. Sedangkan, Sarumaha (2015) menyatakan bahwa secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM.

Analisis hipotesis tiga ( $H_3$ ) diperoleh hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh positif pada

pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa DAU dan DBH mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan memberikan kontribusi pada teori perilaku konsumen. Pemerintah daerah selaku konsumen mengalokasikan pendapatan yang berasal dari transfer untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini mendukung Pusporini (2006) dan Indarto (2011) yang menyatakan bahwa dana perimbangan yang merupakan transfer dari pusat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perimbangan keuangan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB ditujukan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya, mengurangi kesenjangan fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Kebijakan desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah harus mampu mendorong tercapainya tujuan nasional.

Hasil analisis hipotesis empat ( $H_4$ ) diketahui bahwa alokasi belanja daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak mampu memberikan kontribusi terhadap teori *stewardship*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dollery dan Worthington (1995) dan Ekaristi (2007) namun mendukung penelitian Susilowati (2012). Alokasi belanja tidak langsung di Kabupaten/Kota se-Provinsi fNusa Tenggara Barat tahun 2009-2013 pun lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi belanja langsung, sehingga alokasi belanja daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi NTB melalui mekanisme anggaran tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Hasil analisis hipotesis lima ( $H_5$ ) diketahui bahwa alokasi belanja daerah berpengaruh negatif pada indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada teori *stewardship* dimana pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan pribadi atas tingkah laku yang dimilikinya tapi lebih mementingkan keinginan masyarakat. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini *steward* dalam upaya melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja keuangan, belum dilakukan secara optimal sehingga fungsi utilitas yang dicapai belum maksimal.

Hasil analisis penelitian untuk hipotesis enam ( $H_6$ ) menyatakan bahwa alokasi belanja daerah berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini diterima dan penelitian ini berkontribusi pada teori *stewardship*. Penelitian ini mendukung Adi (2006) yang menyatakan bahwa belanja modal (komponen belanja daerah) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia pertumbuhan ekonomi sehingga hipotesis tujuh ( $H_7$ ) dan hipotesis delapan ( $H_8$ ) ditolak. Penelitian ini tidak mampu untuk memberikan kontribusi pada teori *stewardship* dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2011); (Maiputra, 2011); (Suryaningsih, dkk. 2015). Kinerja keuangan daerah (tahun 2010-2014) tidak dapat dijadikan prediktor peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2015. Hal ini terjadi karena jumlah pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kecil sedangkan jumlah belanja relatif besar.

Hasil analisis hipotesis sembilan ( $H_9$ ) dalam penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan daerah memperlemah hubungan dana perimbangan pada indeks pembangunan manusia secara penuh (*full mediation*) dan secara sebagian (*partial mediation*) pada pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009-2013 digunakan sebagai katalisator untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2011-2015. Namun, berdasarkan hasil statistik penelitian peningkatan kinerja keuangan daerah justru memperlemah hubungan dana perimbangan pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terjadi karena dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga kinerja keuangan daerah yang diharapkan meningkat pada tahun sekarang karena adanya dana perimbangan pada tahun sebelumnya belum dapat tercapai. Oleh sebab itu, kinerja keuangan daerah yang digunakan sebagai katalisator mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia secara penuh dan pertumbuhan ekonomi secara sebagian. Hasil ini tidak dapat digunakan untuk mendukung

teori desentralisasi fiskal karena memiliki hubungan yang negatif.

Hasil analisis hipotesis sepuluh ( $H_{10}$ ) penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah berpengaruh secara tidak langsung pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan sebagai variabel memediasi secara sebagian (*partial mediation*). Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah (*steward*) akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja keuangan daerah, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu memaksimalkan alokasi belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2009-2013 dan mengharapkan adanya peningkatan PAD terus menerus pada tahun selanjutnya yakni 2010-2014. Sebagai katalisator, jumlah alokasi belanja yang salah satunya adalah belanja modal telah digunakan untuk membangun infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga adanya peningkatan PAD 2010-2014 yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015.

## SIMPULAN

Terdapat dua simpulan dalam penelitian ini, yaitu untuk hasil pengaruh langsung ditemukan bahwa hanya terdapat dua hipotesis yang diterima dan enam hipotesis lainnya ditolak sedangkan untuk hasil pengaruh tidak langsung ditemukan bahwa satu hipotesis diterima dan satu hipotesis lainnya ditolak. Adapun hipotesis yang diterima yaitu 1) Dana perimbangan terbukti berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Provinsi Nusa Tenggara Barat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena jumlah PAD yang dimiliki masih sangat rendah sehingga pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja lebih besar didanai oleh DAU. Oleh sebab itu, desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu mendorong tercapainya tujuan nasional dalam upaya peningkatan pelayanan publik. 2) Alokasi belanja daerah terbukti berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tahun sebelumnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berikutnya yang disebabkan karena belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2009-2013 pemanfaatannya akan digunakan pada tahun selanjutnya.

Pengujian pengaruh tidak langsung memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan daerah mampu memediasi pengaruh alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi secara sebagian. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 10 dan penelitian Lin dan Liu (2000). Alokasi belanja daerah yang salah satunya belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2009 digunakan untuk membangun infrastruktur di Provinsi NTB sehingga adanya peningkatan PAD pada tahun 2010-2014 yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2011-2015.

Saran yang dapat diberikan bagi pemerintah Provinsit Nusa Tenggara Baratt dalam hal ini Pejabat BPKAD dan DPPKAD di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mampu menentukan strategi yang tepat dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan daerah agar alokasi belanja daerah yang ditetapkan dapat mencapai tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Sehingga kebijakan yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah daerah selaku *steward* yang ditetapkan oleh DPRD (*principal*) harus memperhatikan perilaku masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai.

## REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Adiputra, I Made P. (2014). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah dan Humanika*, 3(2), 1-17.
- Amalia, Firda Rizky, & Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 257-264.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (2016). *PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014*. Mataram: Badan Pusat Statistik.
- Dollery, Brianr & Andrewt Worthington. (1995). *Federal Expenditure and Fiscal Illusion: A Test of the Flypaper Hypothesis in Australia*. *Publius*, 25(1), 23-34.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. (1989). CEO Governance and Shareholder returns: Agency theory or Stewardship Theory. *The Annual Meeting of the Academy of Management*. Washington, DC.
- \_\_\_\_\_. (1991.) Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-65.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Keserasian Belanja Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 8(2), 66-74.
- Ghozali, Imam, & Hengky Latan. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi ke I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A., & Nasirt, A. J. (2006). Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia N0.06/ Tahun XXXV6*.
- Harahapy, Riva Ubar. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 47- 58.
- Holtz-Eakinu, Doglas, Harvey S. M., & Schuyley Tilly. (1994). Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics*, 35, 159-174.
- Indarto, S.L., & Ayu, S.D. (2011). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, dan Job Relevant Information (JRI). Semarang. *Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi, Unika Soegijapranata*, 14(1).
- Kuncoro, Haryo. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 47-63.
- Kuncoro, Haryo. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 8, 1-29.
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerahi*. Malang: BPFE Unibraw.

- Lin, Justin Yifu, & Zhiqiang Liu. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49, 1-21.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1-15.
- Naganathan, M., & K. J. Sivagnanam. (1999). Federal Transfers and Tax Efforts of States in India. *Indian Economic Journal*, 47(4), 101-110.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3). 1120-1149.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
- Pindyck, Robert S., & Rubinfeld, Daniel L. (2007). *Mikroekonomi Edisi 6 Jilid 1*. Jakarta: Indeks.
- Pramuka, Bambang Agus. (2010). Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 1-12.
- Pusporini, Dewi. (2006). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal. *Tesis*. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rakhmawati, Intan, & Siti Atikah. (2015). Do Expenditures of Education, Health, And Infrastructure Improve Human Resources Quality?. *IJABER*, 13(7), 4731-4742.
- Romer, Paul M. (1986). Increasing Return and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-10375.
- Sarumaha, Pemilu. (2015). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara". *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar "Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia"*.
- Tiebout, Charles. (1956). A Pure Theory Of Public Expenditure. *Journal Of Political Economi*. LXIV.
- Titin, V. (2012). Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, 2, 65-74.
- Turnbull, Geoffrey K. (1992). Fiscal Illusion, Uncertainty and the Flypaper Effect. *Journal of Public Economics*, 48. 207-222.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- UNDP. (2004). *Human Development Reportt. United Nations Development Programme*. New York.
- Utama, Suyana. (2014). *Aplikasi Analisis Kuantitatif (Edisi Keempat)*. Modul Statistika Bisnis. Denpasar: Universitas Udayana.